

MATA KULIAH WAJIB  
UMUM  
PENDIDIKAN  
KEWARGANEGARAAN

WIJANTO, S.Pd., M.Sc.



## BAB I

# HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MENGEMBANGKAN KEMAMPUAN UTUH SARJANA ATAU PROFESIONAL

---

- Menelusuri Konsep dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pencerdasan Kehidupan Bangsa
- Menanya Alasan Mengapa Diperlukan Pendidikan Kewarganegaraan
- Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia
- Membangun Argumen tentang Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan
- Mendeskripsikan Esensi dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Masa Depan



Sumber: freepik.com

# MENGENAL SARJANA ATAU PROFESIONAL

---

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, program sarjana merupakan jenjang pendidikan akademik bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah. Lulusan program sarjana diharapkan akan menjadi intelektual dan/atau ilmuwan yang berbudaya, mampu memasuki dan/atau menciptakan lapangan kerja, serta mampu mengembangkan diri menjadi profesional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dapat menjadi sumber penghasilan, perlu keahlian, kemahiran, atau kecakapan, memiliki standar mutu, ada norma dan diperoleh melalui pendidikan profesi.
- Menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Indonesia, yang dimaksud warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Lalu siapakah yang termasuk warga negara Indonesia itu? Telusuri kembali dari berbagai sumber, siapa saja yang termasuk warga negara Indonesia itu. Hasilnya dipresentasikan secara kelompok.

# Apakah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) itu?

---

- Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata “pendidikan” dan kata “kewarganegaraan”. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara.
- Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.
- Secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya: pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945



# Alasan Mengapa Diperlukan Pendidikan Kewarganegaraan?

---

---



Sumber: tribunnews.com

Negara perlu menyelenggarakan Pendidikan Kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap/nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas (smart and good citizen) untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional.

## Istilah pendidikan kewarganegaraan hasil penelusuran Udin S. Winataputra (2006) dan diperkaya oleh Sapriya (2013) sebagai berikut:

---

- Pendidikan Kewarganegaraan (Indonesia)
- Civics, Civic Education (USA)
- Citizenship Education (UK)
- Ta'limatul Muwwatanah, Tarbiyatul Watoniyah (Timteng)
- Educacion Civicas (Mexico)
- Sachunterricht (Jerman)
- Civics, Social Studies (Australia)
- Social Studies (USA, New Zealand)
- Life Orientation (Afrika Selatan)
- People and Society (Hongaria)
- Civics and Moral Education (Singapore)
- Obscesvovedinie (Rusia)
- Pendidikan Sivik (Malaysia)
- Fuqarolik Jamiyati (Uzbekistan)
- Grajdanskiy Obrazavanie (Russian-Uzbekistan)



Sumber: <http://freepik.com>

# Menggali Sumber Historis, Sosiologis, dan Politik tentang Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia

---

- Secara historis, PKn di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka.
- Secara sosiologis, PKn Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia.
- Secara politis, PKn Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan Pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya.



# Dinamika dan Tantangan Pendidikan Kewarganegaraan

---

Untuk mengerti dinamika dan tantangan PKn di Indonesia, Anda dianjurkan untuk mengkaji sbb:

NB: Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya didasarkan pada konstitusi negara yang bersangkutan, tetapi juga tergantung pada tuntutan perkembangan zaman dan masa depan.

1

Perkembangan praktik ketatanegaraan dan sistem pemerintahan RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yakni: (1) Periode I (1945 s.d. 1949); (2) Periode II (1949 s.d. 1950); (3) Periode III (1950 s.d. 1959); (4) Periode IV (1959 s.d. 1966); (5) Periode V (1966 s.d. 1998); (6) Periode VI (1998 s.d. sekarang).

2

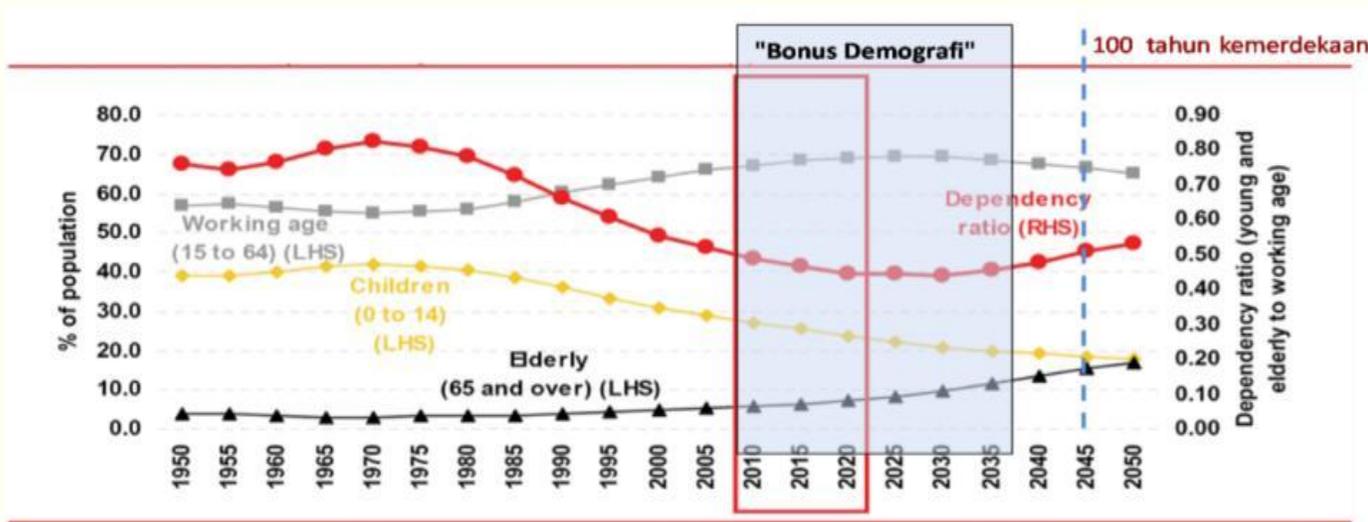
Periodisasi perjalanan sejarah tentang praktik kenegaraan/pemerintahan Republik Indonesia (RI) sejak periode Negara Indonesia diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara merdeka sampai dengan periode saat ini yang dikenal Indonesia era reformasi.

3

Perubahan dalam perkembangan IPTEK

# Esensi dan Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan untuk Masa Depan

PKn Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa



....Indonesia's economy has enormous promise...  
.... Indonesia's recent impressive economic performance is not widely understood ....

Indonesia today ...	... and in 2030
16th-largest economy in the world	7th-largest economy in the world
45 million members of the consuming class	135 million members of the consuming class
53% of the population in cities producing 74% of GDP	71% of the population in cities producing 86% of GDP
55 million skilled workers in the Indonesian economy	113 million skilled workers needed
\$0.5 trillion market opportunity in consumer services, agriculture and fisheries, resources, and education	\$1.8 trillion market opportunity in consumer services, agriculture and fisheries, resources, and education

Perlu dipersiapkan social engineering  
Perlu peningkatan akses, kualitas dan relevansi pendidikan

Sumber: Archipelago Economy: Unleashing Indonesia's Potential (McKinsey Global Institute, 2012)



Sumber: Kemendikbud (2013)